

**PERBUATAN PIDANA RK TERKAIT PELANGGARAN HAK ATAS
DESAIN INDUSTRI TERHADAP ALAT *FITNESS* MEREK MUSCLE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Nama : Cynthia Carissa Kumala
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi terutama pada sektor teknologi telah membawa dampak positif dan juga dampak negatif dalam sektor perdagangan di Indonesia, dimana dampak positifnya adalah membawa peningkatan yang sangat pesat dalam bertumbuh kembangnya sektor perdagangan dan perekonomian dan dampak negatifnya adalah mengakibatkan terjadinya berbagai macam kecurangan yang bersifat melawan hukum, tidak terkecuali terhadap desain industri. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya persaingan usaha yang sangat ketat dalam bidang bisnis dan perdagangan di Indonesia. Dimana dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai tindak pidana atas perbuatan RK terkait pelanggaran hak atas desain industri terhadap alat *fitness* merek MUSCLE, bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan RK dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Perbuatan RK yang membuat dan menjual alat *fitness* yang memiliki kesamaan konfigurasi dengan alat *fitness* merek MUSCLE milik H yang telah didaftarkan hak desain industrinya dan menjualnya dengan harga di bawah harga pasaran alat *fitness* milik H dengan memanfaatkan situasi pasar yang telah mengenal alat *fitness* milik H tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Atas perbuatannya RK dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan RK merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Kedua, RK mampu bertanggungjawab karena pada saat perbuatan tersebut dilakukannya RK sudah dewasa dan tidak mengalami cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Ketiga, RK memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu kesengajaan sebagai maksud. Keempat, RK dalam melakukan perbuatannya tidak ada daya paksa sehingga tidak ada alasan pemaaf.

Kata Kunci: pelanggaran, hak desain industri.

**THE CRIMINAL ACT OF RK FOR THE VIOLATION OF INDUSTRIAL
DESIGN RIGHT ON THE “MUSCLE” BRAND FITNESS EQUIPMENT
VIEWED FROM THE LAW NUMBER 31 OF 2000 REGARDING
INDUSTRIAL DESIGNS**

Name : Cynthia Carissa Kumala
Department/Study Program : Law/Legal Studies
Advisor : Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H.,
M.Hum.
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The development in the technology sector has had a positive impact and a negative impact on the trade sector in Indonesia. The positive impact is it brings a rapid increase in the growth of trade and economic sectors, and the negative impact is it causes various types of fraud that are illegal, one of which is in the industrial design. These crimes may occur due to the very tight competition in the business and trade fields in Indonesia. This study analyzed the criminal act of RK for the violations of the industrial design right of the MUSCLE brand fitness equipment, aiming to determine whether the actions of RK can be subject to criminal responsibility as stated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. The act of RK that made and sold fitness equipment that had the same configuration with the MUSCLE brand fitness equipment which belongs to H who has registered the industrial design rights. RK also sold it at a price below the market price of H's fitness equipment by utilizing the popularity of H's fitness equipment fulfilled the elements in Article 54 paragraph (1) of Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. For his actions, RK could be subject to criminal liability. First, the act of RK was a criminal act that violated the provisions of Article 54 paragraph (1) of Law Number 31 Year 2000 concerning Industrial Design. Second, RK was able to be responsible because at the time the action was carried out, RK had grown up and had no mental defects or illness. Third, RK had intentionally committed the act. Fourth, in carrying out his actions RK was not forced by anyone, so there was no forgiving reason.

Keywords: Violation, Industrial Design Rights